

Implementasi Nilai Persatuan Indonesia dalam Mencegah Konflik Sosial di Era Digital

Ayu Pramudita Putri Wardani ^{a,1}, Resa Parida ^{b,2}

^a Universitas Pamulang, Indonesia

¹ ayupramudhita89@gmail.com

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus meningkatkan potensi konflik sosial melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Situasi ini menyoroti urgensi penguatan prinsip ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, sebagai pedoman etis dalam penggunaan media digital. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam upaya mencegah dan mengurangi konflik sosial di ruang digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur yang mengkaji dinamika hoaks, bias algoritma, dan polarisasi digital dalam konteks kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia berfungsi sebagai kerangka normatif untuk membangun ruang digital yang inklusif dan bertanggung jawab melalui penguatan literasi digital, pengembangan etika kewarganegaraan digital berdasarkan persatuan, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat. Temuan ini menekankan bahwa internalisasi nilai Persatuan Indonesia merupakan strategi penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan memperkuat kohesi sosial di era digital.

ABSTRACT

The development of digital technology has changed the patterns of social interaction among Indonesians while increasing the potential for social conflict through the spread of hoaxes, hate speech, and polarization reinforced by social media algorithms. This situation highlights the urgency of strengthening the third principle of Pancasila, Indonesian Unity, as an ethical guideline in the use of digital media. This study aims to analyze the implementation of the value of Indonesian Unity in efforts to prevent and reduce social conflict in the digital space. This study uses a descriptive qualitative approach through a literature review that examines the dynamics of hoaxes, algorithmic bias, and digital polarization in the context of nationality. The results show that the value of Indonesian Unity serves as a normative framework for building an inclusive and responsible digital space through strengthening digital literacy, developing digital citizenship ethics based on unity, and collaboration between the government, educational institutions, digital platforms, and the community. These findings emphasize that the internalization of the value of Indonesian Unity is an important strategy in creating a healthy digital ecosystem and strengthening social cohesion in the digital era.

Informasi Artikel

Diterima: 14 November 2025

Disetujui: 17 Desember 2025

Kata kunci:

Persatuan Indonesia, konflik sosial digital, etika digital

Article's Information

Received: 14 November 2025

Accepted: 17 December 2025

Keywords:

Indonesian unity, digital social conflict, digital ethics.

Pendahuluan

Sebagai ideologi dan landasan negara, Pancasila terdiri dari lima prinsip yang berfungsi sebagai dasar filosofis, etis, dan moral dalam pengelolaan kehidupan nasional dan negara di Indonesia. Salah satu sila yang memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial adalah sila ke-3, yakni Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan rasa kebersamaan dalam keberagaman, terlebih dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama dan adat istiadat. Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, nilai persatuan menjadi pedoman penting bagi warga negara untuk menjunjung tinggi toleransi, solidaritas, dan semangat kebangsaan dalam berbagai aspek kehidupan. Urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila

semakin meningkat seiring dengan dinamika perubahan sosial yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi dan komunikasi masyarakat. Media sosial menyediakan ruang partisipasi publik yang luas dan cepat, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang diperkuat oleh mekanisme algoritmik (Ali & Eriyanto, 2021; Nisaa et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memengaruhi cara pengguna memaknai informasi, membangun opini, dan berinteraksi dengan kelompok sosial lain. Ketika interaksi digital tidak disertai dengan etika dan kesadaran kebangsaan yang memadai, ruang digital berpotensi menjadi pemicu konflik sosial dan melemahkan persatuan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kesadaran kebangsaan, khususnya dikalangan generasi muda. Fatimah et al (2024), menegaskan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sumber utama informasi, tetapi juga sarana pembentukan opini publik dan identitas sosial. Tanpa penguatan literasi digital dan etika kebangsaan, penggunaan media sosial berisiko memperkuat konflik berbasis identitas serta melemahkan semangat persatuan. Temuan ini sejalan dengan Ali & Eriyanto (2021), yang menunjukkan bahwa hoaks dan misinformasi memperkuat polarisasi akibat kecenderungan pengguna untuk mengonsumsi informasi yang sejalan dengan preferensinya (*selective exposure*).

Selain hoaks, mekanisme algoritma juga menjadi faktor yang memiliki peran sangat mendasar dan penting (esensial) dalam membuat konflik di dunia digital menjadi semakin besar atau memperburuk (eskalasi). Penelitian Raza et al (2023), menunjukkan bahwa algoritma media sosial menciptakan echo chamber yang mempersempit keberagaman informasi dan memperkuat solidaritas kelompok secara eksklusif. Echo chamber ini merupakan keadaan ketika seseorang hanya menerima informasi yang sama dan sejalan dengan pendapatnya sendiri. Kondisi ini, bukan hanya memperkuat solidaritas kelompok secara eksklusif, tetapi juga menciptakan hambatan kognitif yang membuat pengguna menjadi lebih sulit menerima perbedaan perspektif, pandangan, atau identitas. Ketika bias algoritmik bertemu dengan penyebaran hoaks, polarisasi yang muncul semakin kuat dan meningkatkan risiko konflik antar kelompok identitas. Situasi ini menuntut adanya pendekatan mitigasi, yakni serangkaian langkah atau pendekatan yang bertujuan mencegah, membatasi, dan meminimalkan potensi konflik di ruang digital yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau literasi digital, tetapi juga berakar pada nilai-nilai fundamental Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial tanpa disertai kemampuan untuk mengenali serta merespons konten berbahaya dapat memperlemah semangat persatuan. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al (2024), menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dapat memperkuat kemampuan pengguna dalam mengenali dan menangkal ujaran kebencian di media sosial, yang merupakan salah satu bentuk konflik sosial daring yang mengancam kohesi sosial. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan literasi digital dan etika bermedia perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan sosial yang harmonis.

Namun, walaupun beberapa penelitian tersebut telah mengidentifikasi dasar terjadinya konflik digital melalui perspektif teknologi, perilaku pengguna, desain algoritma, dan pola perilaku pengguna, belum banyak kajian yang menghubungkannya dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagaimana prinsip persatuan dapat dipakai untuk memahami dan meredam konflik yang muncul di ruang digital. Dalam penelitian Yuhelna et al (2025), membahas pengaruh budaya platform dan algoritma terhadap pola konsumsi informasi, tetapi tidak menguraikan bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat diterapkan untuk menurunkan risiko polarisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya

kekosongan penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan dinamika konflik digital dengan nilai sila ke-3 sebagai landasan mitigasi konflik. Dengan demikian, kajian mengenai implementasi Persatuan Indonesia dalam mencegah konflik digital menjadi sangat relevan, baik dari sisi akademik maupun praktis, karena menawarkan pendekatan berbasis karakter kebangsaan dalam merespons tantangan era digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, dapat berfungsi sebagai landasan normatif dalam mencegah serta meredam konflik sosial yang berkembang di ruang digital. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan berbagai faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik digital, seperti penyebaran hoaks, polarisasi, dan bias algoritmik, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip persatuan mampu merespons pola interaksi daring yang dibentuk oleh algoritma dan budaya platform. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia, dapat berperan dalam meredam konflik digital serta mendorong terciptanya ruang interaksi daring yang lebih harmonis, inklusif, dan berorientasi pada persatuan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penekanan pada studi literatur (*library research*) sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis serta memahami makna, nilai, dan relevansi Pancasila secara lebih mendalam, terutama ketika dikaitkan dengan tantangan sosial yang muncul di era digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana nilai-nilai dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia berperan dalam menghadapi fenomena seperti hoaks, misinformasi, polarisasi, dan meningkatnya potensi konflik di ruang digital. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan pemaparan yang runtut dan komprehensif mengenai berbagai fenomena, gagasan, serta isu aktual yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Desain ini membantu menyusun informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga hasil analisis dapat dipahami secara utuh oleh pembaca.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis dan terarah. Semua informasi dari literatur dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dari kajian pustaka. Analisis dilakukan dengan cara memilah data yang tidak relevan, kemudian menyusun informasi penting secara terstruktur, hingga akhirnya menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai bagaimana nilai Persatuan Indonesia dapat menjadi landasan penting dalam mencegah dan meredam konflik sosial yang terjadi di ruang digital, serta bagaimana nilai tersebut tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika masyarakat di era modern menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dalam upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan tersebut berasal dari keragaman masyarakat Indonesia, baik dari segi etnis, agama, budaya, maupun perbedaan pandangan hidup. Keragaman ini pada dasarnya merupakan aset bagi bangsa, namun dapat berkembang menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, proses penanaman nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai persatuan dan kesatuan, menghadapi hambatan serius, terutama ketika isu-isu primordial atau sektarian dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kelompok.

Tantangan selanjutnya adalah derasnya arus globalisasi serta digitalisasi yang membawa beragam nilai dan budaya asing ke Indonesia. Perkembangan pesat teknologi informasi mempermudah akses ke konten global, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Misalnya, gelombang globalisasi telah membawa nilai-nilai seperti individualisme, materialisme, dan konsumerisme, yang berkembang pesat di negara-negara Barat dan sering bertentangan dengan semangat kebersamaan dan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Kondisi ini berpotensi melemahkan identitas nasional jika masyarakat, terutama generasi muda, tidak dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang esensi nilai-nilai Pancasila.

Fenomena ujaran kebencian di media sosial berkaitan erat dengan melemahnya integrasi sosial dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan identitas yang beragam. Studi Cahyono dkk (2023), Penelitian oleh Cahyono dkk. (2024) menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial dipengaruhi oleh faktor psikologis individu seperti kematangan emosional dan kecerdasan moral, yang dapat melemahkan kohesi sosial ketika nilai persatuan tidak diinternalisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya internalisasi nilai-nilai persatuan dalam komunikasi digital seperti saling menghormati dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda dapat meningkatkan risiko konflik horizontal di ruang digital. Dalam konteks ini, sila Persatuan Indonesia memainkan peran strategis sebagai prinsip pemersatu yang berfungsi untuk mengelola perbedaan pendapat dan menjaga hubungan sosial yang harmonis di ruang digital (Cahyono dkk., 2023).

Selain itu, hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penyalahgunaan media digital untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa menjadi tantangan penting lainnya. Platform media sosial kerap beroperasi tanpa mekanisme penyaring nilai, sehingga informasi negatif dapat beredar jauh lebih cepat dibandingkan pesan edukatif maupun konten yang mendorong persatuan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia tidak hanya sekadar rumusan ideologis, tetapi juga merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lima sila dalam Pancasila mencakup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang berfungsi sebagai kerangka etika dan moral bersifat universal, tetapi tetap terikat pada konteks Indonesia. Menurut Hidayat (2025), menjelaskan bahwa media sosial berperan ganda sebagai arena untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila sekaligus sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang dapat mengancam persatuan bangsa jika tidak dikelola dengan literasi digital yang baik. Dalam konteks kemajuan teknologi informasi, prinsip-prinsip tersebut tetap penting sebagai acuan etika digital.

Perilaku pengguna media sosial khususnya pada kolom komentar, masih banyak diwarnai oleh praktik komunikasi yang tidak etis seperti ujaran kebencian, provokasi, dan penggunaan bahasa yang tidak santun. Fenomena ini memperkuat temuan Yuliyanti et al (2024), yang menyatakan bahwa proses digitalisasi telah mengubah pola interaksi masyarakat, namun perubahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Menurut mereka, ruang komentar media sosial kerap menjadi arena konflik akibat rendahnya kesadaran etika digital, sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan dan persatuan sosial. Oleh karena itu, penguatan etika Pancasila dalam komunikasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk perilaku pengguna yang lebih inklusif, menghargai perbedaan pendapat, serta berorientasi pada persatuan bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Persatuan Indonesia, dalam praktik bermedia sosial diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang sehat dan kondusif bagi kehidupan demokratis.

Indonesia berada dalam kemajuan pesat di bidang teknologi informasi untuk menstabilkan kehidupan yang modern namun tetap berakhlak mulia. Etika digital yang didasarkan pada Pancasila berusaha untuk mempertahankan keharmonisan dan toleransi dalam dunia digital. Sila kedua dan ketiga, contohnya yang secara jelas menekankan pentingnya menghormati kemanusiaan dan

menjaga kesatuan, selaras dengan prinsip etika ber-media sosial yang mencakup menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan informasi palsu, serta mengedepankan keberagaman. Supriyatno et al (2024), menjelaskan bahwa dalam perkembangan era digital, nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk etika interaksi sosial di masyarakat. Sebagai landasan filosofis negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional, tetapi juga berperan sebagai ikatan sosial yang membentuk karakter dan perilaku warga negara di ruang digital. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik etika sosial melalui penguatan toleransi, keadilan, dan kebersamaan dalam interaksi online. Menurut Nasoha et al (2025), Pancasila berperan sebagai pedoman etis dalam pendidikan digital sehingga pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan kompetensi teknologis, tetapi juga menumbuhkan nilai moral dan karakter kebangsaan.

Dalam konteks pendidikan, penerapan etika digital berbasis Pancasila dapat diperkokoh melalui integrasi nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum teknologi dan literasi digital. Peserta didik tidak hanya diajarkan cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam interaksi daring. Program pembiasaan seperti diskusi sehat, praktik empati digital, serta pembelajaran berbasis proyek mengenai isu-isu sosial aktual dapat membentuk budaya digital yang lebih etis. Dengan demikian, etika digital tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar tertanam dalam kebiasaan sehari-hari untuk penggunaan teknologi.

Selanjutnya, pada tataran yang lebih operasional, penguatan kewarganegaraan berbasis Pancasila di ruang digital memerlukan serangkaian strategi yang saling melengkapi. Secara umum, strategi-strategi tersebut mencakup peningkatan literasi digital yang berlandaskan nilai persatuan. Literasi digital tidak seharusnya hanya terpusat pada kemampuan teknis, tetapi juga harus meliputi kemampuan analitis, etika, serta rasa empati. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) harus memperluas materinya. memuat nilai-nilai seperti kerja sama, rasa tanggung jawab, dan kejujuran. Integrasi ini akan memudahkan masyarakat untuk memahami cara memakai teknologi secara cermat dan bermoral.

Strategi kedua melibatkan perubahan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk mengintegrasikan pendidikan karakter digital yang berlandaskan Pancasila. Strategi ketiga melibatkan penguatan peraturan etika teknologi di tingkat nasional. Pemerintah perlu menyusun pedoman etika dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), data besar, dan Internet of Things (IoT), yang ketiganya memiliki potensi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Pedoman ini harus memastikan bahwa teknologi dikembangkan untuk keuntungan manusia, bukan untuk penindasan.

Strategi ketiga adalah pengembangan inklusivitas digital. Distribusi akses yang merata internet sampai ke daerah terpencil harus menjadi fokus nasional agar semua Masyarakat mendapatkan peluang yang setara untuk merasakan keuntungan digitalisasi. Oleh karena itu, Nilai keadilan sosial yang diharapkan oleh sila kelima bisa terwujud. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam membangun infrastruktur digital yang seimbang. Strategi kelima ialah memperkuat pengelolaan media sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurut Nasoha et al (2025), tanpa strategi komunikasi digital yang tepat, media sosial justru berpotensi memperkuat polarisasi dan melemahkan nilai kebangsaan, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi berbasis Pancasila yang kontekstual dan partisipatif. Penelitian Fadillaa & Hidayah (2024), menunjukkan bahwa penguatan kecerdasan kewarganegaraan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kompetensi warga negara di era digital, khususnya melalui pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas interaksi warga negara di ruang digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas etis dan karakter kewarganegaraan yang dimiliki individu. Platform digital perlu diikutsertakan dalam usaha membangun ruang siber yang sehat seperti dengan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang dapat menyebabkan perpecahan

memecah atau menyebarkan kebencian. Kerja sama antara pihak berwenang dan penyedia layanan digital dapat berkontribusi dalam mengembangkan algoritma yang lebih etis dan inklusif.

Pratama & Widodo (2023), mengungkapkan bahwa efektivitas penguatan kewarganegaraan digital sangat ditentukan oleh kolaborasi antara kebijakan pemerintah, pendidikan karakter di sekolah, serta keterlibatan aktif komunitas daring. Ketika warga digital berpartisipasi dalam aktivitas gotong royong virtual seperti kampanye literasi, pelaporan konten berbahaya, dan pembuatan konten edukatif nilai persatuan dan kepedulian sosial dapat diwujudkan secara konkret. Karena itu, kewarganegaraan digital berlandaskan Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi menjadi praktik nyata yang mendorong terciptanya ruang digital Indonesia yang sehat, inklusif, dan berkarakter.

Menurut Agustin & Akmaluddin (2024), konflik sosial yang berkembang di ruang digital tidak cukup ditangani melalui pendekatan teknis semata, seperti penghapusan konten atau pemblokiran akun, melainkan memerlukan pendekatan berbasis nilai Pancasila. Mereka menegaskan bahwa penerapan nilai musyawarah mufakat dalam interaksi digital mampu mendorong dialog yang lebih inklusif, setara, dan berorientasi pada kepentingan bersama, sehingga dapat menurunkan polarisasi serta meredam konflik sosial di media sosial. Dalam pandangan mereka, adaptasi musyawarah mufakat ke ruang digital merupakan bentuk aktualisasi nilai Persatuan Indonesia yang relevan dengan karakter komunikasi masyarakat di era digital.

Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa konflik sosial di era digital tidak hanya dipicu oleh faktor teknologis seperti hoaks, polarisasi, dan bias algoritmik, tetapi juga oleh lemahnya internalisasi nilai kebangsaan dalam perilaku digital masyarakat. Sila ke-3 Persatuan Indonesia memberikan kerangka normatif yang relevan untuk meredam dinamika konflik tersebut karena menekankan pentingnya kohesi sosial, penghargaan terhadap keberagaman, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga keutuhan bangsa. Implementasi nilai persatuan terbukti mampu mengarahkan praktik bermedia digital menuju interaksi yang inklusif, etis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penerapan nilai tersebut membutuhkan strategi yang tidak parsial, melainkan terintegrasi. Penguatan literasi digital berbasis Pancasila, pengembangan etika kewarganegaraan digital, kurikulum karakter yang kontekstual, tata kelola teknologi yang etis, serta kolaborasi lintas aktor menjadi langkah yang harus dikerjakan secara simultan. Ketika masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital menjalankan perannya masing-masing, ruang digital dapat berfungsi sebagai arena yang memperkuat solidaritas nasional, bukan memicu perpecahan. Dengan demikian, internalisasi nilai Persatuan Indonesia bukan hanya respon normatif terhadap tantangan digital, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk membangun ekosistem digital yang sehat, adil, dan berorientasi pada kohesi sosial. Upaya ini menjadi syarat penting agar transformasi digital berjalan sejalan dengan karakter kebangsaan dan mampu menjaga keutuhan masyarakat Indonesia di tengah perubahan zaman.

Referensi

- Agustin, H., & Akmaluddin, A. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Musyawarah Mufakat Dalam Era Digital: Analisis Konflik Sosial Media Berdasarkan Perspektif Pancasila. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1-7. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2359>
- Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political polarization and selective exposure of social media users in indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 268-283. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/58199>
- Andriani, A. D., Fitri, S. A., & Muchtar, K. (2024). Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 439-464. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/68081>

- Cahyono, A. B. F., Khalisah, A., Safitri, L., Lestari, T., Hudaya, Y. N., Mulyana, A. (2023). Ujaran Kebencian di Media Sosial: Ditinjau dari Kematangan Emosi Dengan Kecerdasan Moral sebagai Mediator. *Jurnal Psikologi Integratif*, 11(2), 205-218. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/PI/article/view/2750>
- Fadilla, V. Z., & Hidayah, Y. (2024). Penguatan kecerdasan kewarganegaraan sebagai strategi peningkatan kompetensi warga negara di era digital. *AGORA: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1), 475-483. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/agora/article/view/23398>
- Fatimah, N., Reza, A. P. A., & Sutari, D. (2023). Pengaruh media sosial terhadap kesadaran kebangsaan. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, 4(1), 45-56. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1611>
- Hidayat, N. (2025). Narasi kebangsaan di era media sosial: Relevansi Pancasila dalam ekosistem digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105-118. <https://jurnal.unipasby.ac.id/pacivic/article/view/10183>
- Mustain, A. M., Nasoha, A. M., Atqiya, A. N., Nugraheni, A. D., Ridho, M. R., & Aprilianto, M. A. (2025). Digital Pancasila: Strategi komunikasi dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan di era media sosial. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 137-152. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/4825>
- Mustain, A. M., Nasoha, A. M., & Atqiya, A. N. (2025). Pancasila sebagai paradigma etis bagi transformasi digital pendidikan Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(4), 38-56. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/view/1326>
- Nisaa, N. H., Kusumawati, I., & Purnama, K. G. (2025). Refleksi Kritis Terhadap Relevansi Pancasila Di Era Disrupsi Digital. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(1), 35-42. <https://jurnal.ucey.ac.id/index.php/AoSsAGCJ/article/view/3064>
- Pratama, R., & Widodo, S. (2023). Sinergi pemerintah, pendidikan, dan komunitas dalam penguatan kewarganegaraan digital berbasis Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 14-25. <https://ppjp.ulm.ac.id/jurnal/index.php/pkn/article/view/16940>
- Raza, A. M., Aulia, N., & Sopian, S. (2025). The Echo Chamber Effect: Analisis Sosiologis Peran Algoritma Media Sosial Dalam Pembentukan Solidaritas Dan Polarisasi Kelompok Di Indonesia. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 3(1), 39-52. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JBK/article/view/27736>
- Supriyatno, M. J., Nugroho, R. A. R., Pasha, Z. M., Siregar, S. A., & Kembara, M. D. (2024). Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Etika Bersosial Di Era Digital. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 51-62. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JBK/article/view/27736>
- Yuhelna., Huwaida, W. A., Novia., Ardila., Rahmat, K. G., & Mulyadi, A. (2025). Algorithms, Filter Bubbles, and Information Consumption Patterns: Implications of Mass Communication In Digital Platforms. *Journal of Humanity Studies*, 4(1), 1-10. <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jhs/article/view/9567>
- Yuliyanti., Gunawan, N. P., Kurnianto, F., & Antoni, H. (2024). Perubahan Digitalisasi dalam Membangun Etika Pancasila Pada Lingkup Komentar di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, 1(7), 210-217. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/4628/4368>